

# SKRIPSI

MARRYA YUNITA INDRAWATI

## HAK PATEN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI (STUDI KASUS HONDA Vs MOTOR CINA)




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001

**HAK PATEN DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI  
(STUDI KASUS HONDA Vs MOTOR CINA)**

**SKRIPSI**

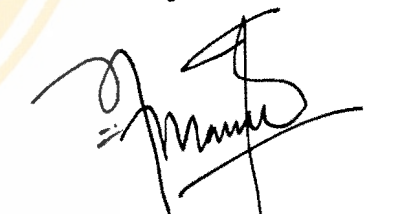
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Rahmi Jened, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 923 881**

**Penyusun,**



**Marrya Yunita Indrawati**  
**NIM. 039714533**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 21 Agustus 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.**

**Anggota : 1. Rahmi Jened, S.H., M.H.**

**2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.**

**3. H. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.**

**4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.**

The block contains five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The first signature is at the top, followed by four more. The signatures are stylized and appear to be the names of the committee members listed on the left. The background of the page features a large, faint, circular watermark of the University of Airlangga logo, which includes a Garuda bird and the text 'UNIVERSITAS AIRLANGGA'.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Sistem perolehan paten yang diatur dalam UU Paten menunjukkan bahwa adanya prinsip *first to file*. Dengan prinsip ini anggapan hukum (presumed) timbul bahwa pendaftar yang beriktikad baik adalah sebagai pemegang hak paten yang pendaftarannya mensyaratkan pemenuhan syarat formil (kelengkapan dokumen/administratif) dan materiil (*novelty, inventive step, industrially aplicable*). Disamping itu sistem perolehan paten memungkinkan pengembangan sektor industri, karena masyarakat dapat belajar dari penemuan yang diungkapkan dalam spesifikasi paten, khususnya pada periode pengumuman. Jangka waktu perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak *filling date*. Seperti halnya paten dekompresor Honda akan berlangsung sampai dengan 2005 sebelum menjadi *public domain*.
- b. Pemegang paten dapat mempertahankan haknya jika terjadi pelanggaran oleh pihak lain, yaitu melalui upaya hukum baik jalur perdata maupun jalur pidana. Selain itu dimungkinkan penyelesaian diluar pengadilan dengan upaya damai seperti yang dilakukan oleh Honda Co. Ltd. Melalui kuasanya, pada kasus Honda Vs Motor Cina



yang dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran yang akan terjadi berikutnya.

## 2. Saran

- a. Perbaikan terhadap Undang-undang yang ada sekarang, misalnya penambahan tentang pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui negoisasi atau yang paling penting sekarang ini adalah mekanisme Arbitrase baik dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan agar Undang-undang Paten Indonesia tetap mengikuti perkembangan standar internasional sesuai dengan ketentuan TRIPs, dan hal ini sangat penting bagi perkembangan sektor industri
- b. Agar kasus-kasus yang terjadi dalam praktek ditangani/ mendapat perhatian yang serius dari aparat penegak hukum. Bila penanganan ini kurang diperhatikan maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi pengembangan sektor industri.
- c. Dalam membuat kebijakan atau peraturan, pemerintah seharusnya mengadakan koordinasi antara instansi-instansi yang terkait (dalam hal ini adalah Deperindag dengan Dirjen HAKI). Agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan dan menghilangkan kesan ketidakprofesionalan pejabat Indonesia.